

BPK Tak Beralasan Ragu ataupun Takut

JAKARTA (Suara Karya): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu lebih berani dalam mengungkap fakta kasus Bank Century. Ini sangat beralasan karena BPK merupakan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga lain seperti DPR. Karena itu, realita yang dikemukakan BPK adalah untuk memenuhi keinginan rakyat.

Dalam percakapan dengan *Suara Karya*, akhir pekan lalu, di Jakarta, ekonom Dradjad H Wibowo mengatakan bahwa BPK merupakan bagian struktur dalam pemerintahan. Justru karena itu, sama sekali tidak beralasan BPK ragu apalagi takut menelusuri dan mengungkap kasus Bank Century. "BPK harus cepat dan berani mengungkap fakta yang sebenarnya. Jangan takut apapun," katanya.

Sebagai lembaga yang berwenang memeriksa segala perihal keuangan negara, BPK dituntut bekerja optimal. Tidak

terkecuali dalam kasus Bank Century yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara. Apalagi struktur organisasi BPK telah mengalami perubahan.

Harapan ke arah itu kini ada di pimpinan BPK periode 2009-2014 yang terdiri atas Hadi Purnomo (ketua), Hasan Bisri, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Taufiequrrahman Ruki, Muhammad Nurlif, dan Ali Masykur Musa.

Sementara itu, anggota Tim Pencari Fakta (TPF) kasus dugaan kriminalisasi pimpinan KPK, Anies Baswedan, mengakui antara kasus Bank Century dan kasus hukum dua pimpinan nonaktif KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, memiliki kaitan. Karena itu, katanya, kasus Bank Century mendapatkan porsi cukup banyak dalam pembahasan TPF.

LANJUTAN:**BPK Tak Beralasan ...****Hal 15**

BPK Tak Beralasan Ragu ataupun Takut

"Soal Century dibicarakan agak panjang. Kami merasa bahwa kasus Century ini terkait sekali dengan kasus Chandra dan Bibit," ujar Anies. Namun, dia menyebutkan, Tim Delapan belum mengambil langkah khusus soal kasus Bank Century karena keterkaitan itu baru sebatas dugaan-dugaan.

Dalam kesempatan terpisah, anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Tjatur Sapto Edi, mendesak KPK agar tidak menunggu hasil audit BPK. "Presiden sendiri kan sudah bilang, tuntaskan dan buka," katanya.

Tjatur menambahkan, jika sudah memiliki petunjuk awal tentang skandal Bank Century, KPK tidak perlu menunggu hasil audit BPK yang diperkirakan baru rampung akhir tahun ini. "Kalau tunggu-tungguan begitu,

tidak akan jalan," katanya.

Tjatur yakin, KPK memiliki data yang tidak dimiliki BPK sehingga mereka tetap bisa jalan tanpa harus berpegang pada audit BPK. Jika audit itu nanti keluar, katanya, KPK bisa menggunakannya sebagai pembandingan.

Sementara itu, ekonom A Prasetyantoko mengatakan, ke depan ini Bank Indonesia harus meningkatkan sistem pengawasan terhadap perbankan. Jangan sampai kasus seperti Bank Century terulang kembali.

Dia mengaku tidak mengetahui pasti status hukum bagi mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang aliran dana talangan (*bail-out*) untuk Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. "Bagi saya, yang paling penting mekanisme supervisi oleh BI harus

dibenahi," tuturnya.

Prasetyantoko sangat mendukung pihak-pihak terkait, semisal Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang mau memenuhi undangan BPK untuk keperluan klarifikasi penyaluran dana talangan untuk Bank Century.

Sebelumnya, BPK berjanji menuntaskan kasus Bank Century. Pada akhir masa jabatannya sebagai Ketua BPK, Anwar Nasution mengaku telah merekomendasikan penanganan kasus Bank Century kepada tim investigasi BPK untuk terus menuntaskan pekerjaan mereka.

Di lain pihak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data aliran dana penyelamatan Bank Century. Ketua PPATK Yunus

Hussein mengatakan, PPATK hanya membutuhkan waktu karena banyaknya rekening yang harus mereka periksa untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Untuk membantu BPK mempercepat penyelesaian audit kasus Bank Century, menurut Yunus, PPATK telah bertemu dengan pihak BPK untuk menanyakan prioritas data aliran dana yang dibutuhkan. "Karena kan *deadline*-nya tanggal 19 November ini bagi BPK untuk memberikan laporan. Jadi, waktunya agak *mepet*, tapi kami akan bantu," tutur Yunus.

Dia mengatakan, data yang dibutuhkan BPK segera diserahkan PPATK. Adaapun mengenai data aliran dana talangan untuk penyelamatan Bank Century, PPATK masih mencarinya. (Agus/Sabpri)